



# **RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 merupakan pengaplikasian Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dompu. Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Dompu 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius (MASHUR)”**

Dompu, Januari 2022  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Dompu,

**Amiruddin, S.Hut**  
Pembina/IV/a  
NIP. 19711130 199803 1 009

# DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
2.2 Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Dompu.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	21
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	24
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	26
3.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Restra Dinas Kelautan Dan Perikanan .....	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi .....	29
3.5 Penentuan Isu-isu Strategi.....	31
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	33
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi.....	36
5.2 Kebijakan .....	37
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA         PENDANAAN.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VIII : PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### TABEL

1. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan pendidikan dan diklat.....	15
2. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	15
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan tingkat pendidikan .....	16
4. Jumlah pegawai berdasarkan golongan .....	16
5. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan .....	16
6. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	17
7. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan .....	19
8. Realisasi Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan.....	20
9. Masalah Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan .....	24
10. Telahaan Visi dan Misi .....	27
11. Telahaan RENSTRA Kelautan dan Perikanan.....	29
12. Telahaan RT/RW dengan Implementasi .....	30
13. Isi dan Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan.....	31
14. Tujuan yang ditetapkan untuk Mencapai Misi Kepala Daerah .....	33
15. Sasaran yang ditempuh untuk Mencapai Tujuan .....	34
16. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 .....	35
17. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 .....	39
18. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada RPJMD.....	43
19. Indikator Kinerja Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2026 .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 memiliki visi pembangunan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius (MASHUR)”** dengan 5 (enam) misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih);
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan potensi local yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap serta berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkarakter berbasis kearifan lokal;

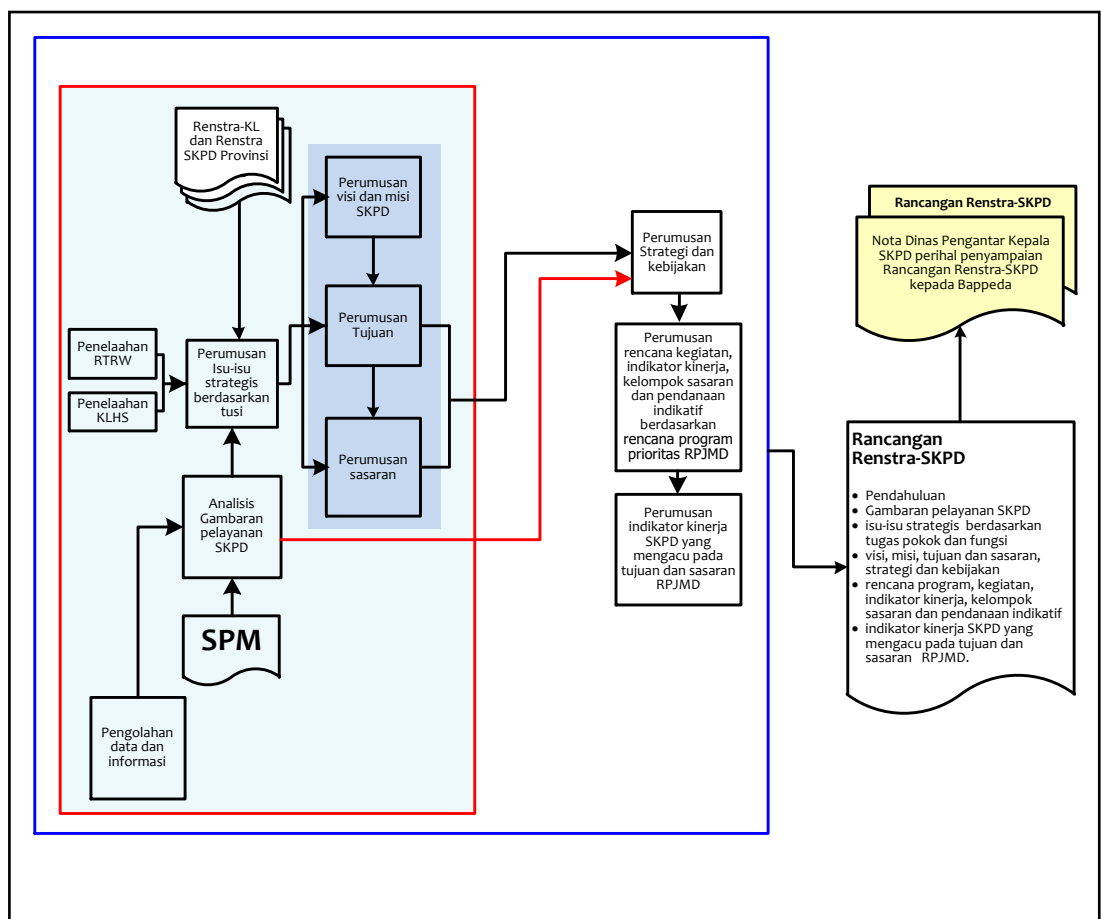
Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Dompu 2021-2026 yang dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) adanya perubahan target pencapaian pembangunan di Kabupaten Dompu dalam target pembagian peran pencapaian indikator kinerja pembangunan Nasional 2020-2024, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; (2) adanya perubahan kewenangan pemerintah Kabupaten Dompu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan (3) adanya beberapa strategi, kebijakan dan program baru dari Bupati dan Wakil Bupati Dompu sebagai upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026.

Memperhatikan beberapa pertimbangan diatas, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Dompu, paradigma pembangunan Kelautan dan Perikanan tetap selaras mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk :

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara ;
3. Mendorong perluasan kesempatan kerja
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industry
8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumberdaya ikan ; dan
9. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan dan tata ruang.

**Gambar 1.** Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu



Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu yang disusun setiap Tahun selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun. Selain itu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, baik Evaluasi renstra maupun Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1649).
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851).
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

24. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2006 Nomor 13);<sup>9</sup>
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 adalah secara umum untuk memberikan kerangka tindak bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, swasta, masyarakat dalam mendukung program pengembangan ekonomi di sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Dompu. Secara khusus Renstra ini akan menjadi acuan dalam proses monitoring sehingga kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dapat terukur dengan melihat sejauh mana Dinas Kelautan dan Perikanan mencapai indikator yang dibuat.

Ketersediaan dokumen ini juga diharapkan menjadi salah satu acuan dasar untuk mengukur dan mencapai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu serta mengevaluasinya dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan, terutama dalam rangka mencapai dan mengemban visi pembangunan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 menuju masyarakat Kabupaten Dompu yang “MASHUR (Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius)”

Tujuan Renstra ini adalah sebagai dokumen strategis bagi para stakeholder sektor Kelautan dan Perikanan yang ada di kabupaten Dompu yaitu, orang-orang yang ingin memulai usaha di bidang Kelautan dan Perikanan, sektor swasta, sektor publik serta organisasi-

organisasi berbasis masyarakat yang konsen terhadap pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari pemeran ekonomi akan mengambil peran sebagai fasilitator dan katalisator dalam usaha peningkatan daya tarik, peningkatan daya tahan serta peningkatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu melalui langkah-langkah strategis yang dirumuskan secara sistematis dalam bab-bab selanjutnya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut ;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu
	2.2 Sumberdaya
	a Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu
	2.4 Tantangan dan Pelayanan Pengembangan Pelayanan
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi NTB

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi

4.2 Misi

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Kebijakan

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KELUATAN  
DAN PERIKANAN

Bab VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

8.2 kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU**

##### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dibentuk dan mempunyai tugas pokok dan fungsinya didasarkan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu, yang memuat ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dompu pada Bab II (Kedudukan) pasal 2 dinyatakan :

1. Dinas-Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah
2. Dinas-Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan mengenai tugas dan fungsinya diatur pada BAB IV Bagian ke Tujuh Belas b Pasal 20 Peraturan Bupati Dompu nomor 24 tahun 2016 tersebut, yaitu:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, pelayanan kepada masyarakat dan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diatas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan
  - b. Perencanaan program dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Kelautan dan Perikanan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu diatur pada Bab IV Bagian ke Tujuh Belas pasal 20 Perbup Nomor 24 Tahun 2016 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Subbagian Program dan Pelaporan dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Umum dan Kpegawaian.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
  - 1. Seksi Produksi Perikanan
  - 2. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan dan
  - 3. Seksi Budidaya dan Usaha Perikanan.
- d. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari :
  - 1. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
  - 2. Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil dan Konservasi
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pengembangan Usaha dan Kelembagaan
- e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Bina Mutu, Diversifikasi produk Kelautan dan Perikanan ;
  - 2. Seksi Pengembangan Investasi dan Sistem Logistik ;
  - 3. Seksi Akses Pasar Promosi
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan sesuai Peraturan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

Adapun ringkasan tugas Kepala Dinas, adalah sebagai berikut ;

- a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan, pelayanan kepada masyarakat dan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi

Adapun fungsi Kepala Dinas, adalah sebagai berikut ;

1. Perumusan Kebijakan Tekhnis Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Kelautan dan Perikanan
4. Pengkoordinasian dan Pembinaan Tugas Bidang Kelautan dan Perikanan
5. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Tugas di Bidang Kelautan dan Perikanan
6. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya

**2. Sekretariat**

Adapun Ringkasan Tugas sekretariat, adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor

Adapun fungsi Sekretariat, adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan sbb;
  - Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - Masing-masing subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada

sekretaris.

### **3. Bidang Perikanan Budidaya**

Ringkasan Tugas :

- a. Melakukan Perumusan pelaksanaan kebijakan dan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA), melakukan bimbingan teknis, pemetaan tata ruang komoditas, inventarisasi, sarana dan prasarana, tata alih fungsi lahan Kelautan dan Perikanan serta pemulihan sumber daya Kelautan dan Perikanan

Fungsi :

1. Bidang Perikanan Budidaya membawahi dan mengkoordinasikan
2. Seksi produksi dan sarana prasarana budidaya
3. Seksi pembenihan dan kesehatan lingkungan
4. Seksi Usaha Budidaya

### **4. Bidang Perikanan tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir Pantai Dan Pulau-Pulau Kecil**

Ringkasan Tugas :

- a. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melakukan bimbingan teknis, inventarisasi, dan penerapan peraturan-peraturan dibidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

Fungsi :

1. Bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil membawahi dan mengkoordinasikan
2. Seksi Sarana dan Prasaran penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya ikan
3. Seksi tata ruang laut dan pendayagunaan pesisir, pulau-pulau kecil dan konservasi
4. Seksi pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan usaha dan kelembagaan

### **5. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Ringkasan Tugas :

- a. Melakukan Perumusan pelaksanaan kebijakan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, melakukan

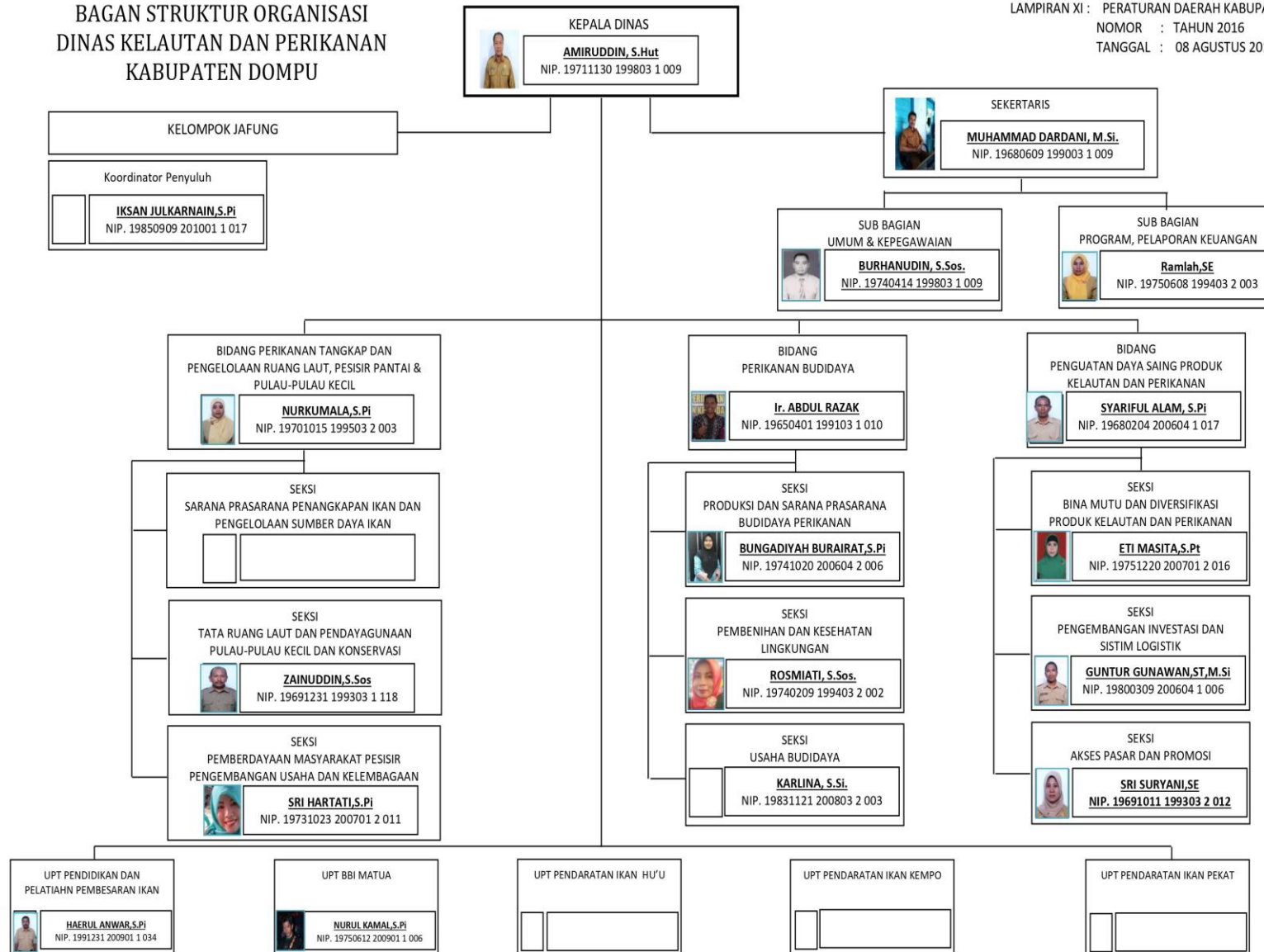
bimbingan teknis, pembinaan mutu komoditas, sistim logistik, inventarisasi dan kaedah-kaedah kesinambunagn usaha sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Fungsi :

1. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan membawahi dan mengkoordinasikan
2. Seksi Bina Mutu dan diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan
3. Seksi Pengembangan Investasi dan Sistim Logistik
4. Seksi Akses Pasar dan Promosi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN DOMPU**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2016



## 2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu sumber daya manusia dengan jumlah personil Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 82 orang dengan komposisi berdasarkan golongan, pendidikan dan Diklat sbb.:

**Tabel 1.** Kompoisisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan, Pendidikan dan Diklat

Pendidikan dan Diklat						
No	Status	Ess.	Pendidikan	Jumlah	Diklat	
					Diklatpim	Jml
1	PNS Pemegang Jabatan	II	S1	-	SPAMA	18
		III	S2	2	SPAMA	
			S1	2	SPAMA	
		IV	S1	13	ADUM	
			S2	1		
			Sarmud SMU SMP			
2	PNS Staf		S1	8		20
			Sarmud			
			SMU	7		
			SMK	2		
			SMP	2		
			SD	1		
3	Kontrak Daerah		S1	4		12
			SARMUD			
			SMU SMP	6 2		
4	Kontrak Dinas		S1	4		16
			SARMUD			
			SMU SMP	9 3		
5	Tenaga Sukarela		S1	10		17
			SARMUD			
			SMU SMP	7		
	Jumlah			82		82

**Tabel 2.** Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki~Laki	Perempuan	Jumlah
58	25	82

**Tabel 3.** Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki~Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
SD	1		1
SMP	7	1	8
SMA	30	8	39
S.1	17	15	32
S.2	1		1
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>24</b>	<b>80</b>

**Tabel 4.** Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

<b>Golongan</b>	<b>Laki~Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
IV	4	1	5
III	13	8	21
II	10	1	11
I	1		1
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>38</b>

**Tabel 5.** Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

<b>Jabatan</b>	<b>Laki~Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon II	1		1
Eselon III	3	1	4
Eselon IV	7	7	14
Fungsional	3	1	4
Staf	14	2	16
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>39</b>

### 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki sumber daya sarana dan prasarana yang masih kurang memadai baik kualitas dan kuantitasnya. Gambaran kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 6.** Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang	Ruang				Jumlah	Ket
		Kepala Dinas/ Sekretariat	Bidang Perikanan Budidaya	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir Pantai, dan Pulau - Pulau Kecil		
<b>I</b>	<b>KIB A</b>					<b>42.882.00 m2</b>	
1	Tanah Bangunan Pemerintahan	-	-	-	-	<b>42.882.00 m2</b>	Baik
<b>II</b>	<b>KIB B</b>					<b>187</b>	
1	Kendaraan Dinas Roda 4	3	1	1	2	<b>7</b>	Baik/Rusak
2	Kendaraan Dinas Roda 2	8	4	4	4	<b>20</b>	Baik/Rusak
3	Meja Eselon II	1	-	-	-	<b>1</b>	Baik
4	Meja Eselon III	1	1	1	1	<b>4</b>	Baik
5	Meja 1/2 Biro	15	7	6	10	<b>38</b>	Baik
6	Meja Rapat	11				<b>11</b>	Baik
7	Kursi kerja Eselon II	1				<b>1</b>	Baik
8	Kursi Eselon III	1	1	1	1	<b>4</b>	Baik
10	Kursi Kerja	15	7	6	10	<b>38</b>	Baik
11	Kursi Tamu/Sofa	2	1	1	1	<b>5</b>	Baik
12	Kursi Rapat	24				<b>24</b>	Baik
15	Lemari ES	1		1		<b>2</b>	Baik
16	Estalase	1				<b>1</b>	Baik
17	AC	2				<b>2</b>	Baik
18	Televisi	1				<b>1</b>	Baik
19	Laptop	12	3		2	<b>17</b>	Baik
21	Scanner	1				<b>1</b>	Baik

No.	Nama Barang	Ruang				Jumlah	Ket
		Kepala Dinas/ Sekretariat	Bidang Perikanan Budidaya	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir Pantai, dan Pulau - Pulau Kecil		
22	Printer	4	1	1	1	7	Baik
23	Proyektor	1				1	Baik
25	Layar Proyektor	1				1	Baik
28	Soundsystem/ Speaker	1				1	Baik
<b>III</b>	<b>KIB C</b>					<b>3</b>	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	-	-	1	<b>6.073 m2</b>
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	-	-	-	1	<b>26.756 m2</b>
4	Konstruksi Pagar	1	-	-	-	1	<b>669 m</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>107</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>187</b>	

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

### 2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu SKPD pelayanan di Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki rincian pelayanan sebagai berikut:

**Tabel 7.** Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Bagian	Jenis Pelayanan	Sasaran Pelayanan
1	Sekretariat	Melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Umum, Kepegawaian, keuangan, Perlengkapan dan Pemeliharaan Kantor	- Seluruh ASN, Honda, Kontrak Dinas/Sukarela - Aset, Pemeliharaan Aset/Kantor - Masyarakat/Tamu Dinas
2	Bidang Perikanan Tangkap	Melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, inventarisasi, dan penyerapan peraturan-peraturan di Bidang Perikanan Tangkap dan pengelolaan ruang laut, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap (Nelayan)
	Bidang Perikanan Budidaya	Melaksanakan perumusan kebijakan dan pengelolaan lahan dan air (PLA), bimbingan teknis, pemetaan tataruang komoditas, inventarisasi, sarana dan prasarana, tata alih fungsi lahan Kelautan dan Perikanan serta pemulihan sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha Budidaya Perikanan (Pembudidaya Tawar, Payau dan Laut)
	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan perumusan kebijakan, penguatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan, bimbingan tekni, pembinaan mutu komoditas, system	Pelaku usaha pengolah dan pemasar produk Kelautan dan Perikanan

		logistik, inventarisasi dan kaedah-kaedah kesinambungan usaha sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
--	--	---	--

### 2.3.2 Kinerja Pelayanan

Undang-undang Nomor 45. Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efiseinsi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memepluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi Kelautan dan Perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk mengembangkannya

**Tabel 8.** Realisasi Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Dompu Tahun 2016 s/d 2021

Tujuan : Meningkatkan Produksi Kelautan dan Perikanaan												
Sasaran : Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan serta Meningkatkan Konsumsi Ikan Masyaaraakat												
Indikator	Tahun											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	(T)	(K)	(T)	(K)	(T)	(K)	(T)	(K)	(T)	(K)	(T)	(K)
Persentase Produksi Perikanan Tangkap	55,79	90,3	61,56	110,8	87	101,5	90,56	106,3	95,12	104,4	100	100,1
Persentase Produksi Perikanan Budidaya	51,43	54	57,9	83,87	81,57	69,34	91,06	100,5	96,68	99,11	100	103,7

Persentase Produk Olahan Kelautan dan Perikanan	93,04	82,4	93,91	96,46	94,78	93,71	97,39	95,42	99,13	98,86	100	99,59
---	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------

Keterangan : T (Target), K (Kinerja)

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Tahun 2021

Beberapa kegiatan yang mendukung IKU Dinas Kelautan dan Perikanan, telah dilaksanakan kegiatan antara lain sebagaia berikut :

1. Telah dilaksanakannya penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat perikanan tentang pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari (mangrove, transplantasi karang, ikan, dll) dan alat tangkap ramah lingkungan serta pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan usaha dan kelembagaan. Telah menyelenggarakan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan untuk masyarakat nelayan
2. Telah dilaksanakannya pembinaan yang intensif terhadap pembudidaya baik pembudidaya air tawar, air payau dan laut serta terus memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan yang memadai
3. Telah dilakukannya bimtek pengolahan, pemasar, dan dilaksanakan sosialisasi FORIKAN, GEMARIKAN, melakukan pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah, menjadi guru tamu dan kunjungan edukasi ke sentra kegiatan perikanan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu pada 5 (Lima) Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a) Rusaknya ekosistem laut, kerusakan hutan mangrove,

- destructive fishing, sedimentasi dan residu zat kimia akibat aktivitas di darat dan cuaca ekstrim (angin dan gelombang) yang berdampak pada menurunnya jumlah hasil tangkapan nelayan
- b) Maraknya penangkapan baby lobster dan penggunaan bahan serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan.
  - c) Keadaan cuaca yang tidak menentu dan intensitas hujan yang tinggi serta bencana alam banjir (ROB) menyebabkan menurunnya produksi perikanan budidaya
  - d) Harga sarana dan prasarana budidaya (pakan, benih/bibit ikan, obat-obatan, dll) yang cenderung terus meningkat sehingga berpengaruh terhadap keuntungan hasil usaha budidaya
  - e) Mekanisme logistik sektor kelautan dan perikanan belum tertata dengan baik
  - f) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat
  - g) Rendahnya investasi di sektor kelautan dan perikanan
  - h) Standar mutu produk kelautan dan perikanan yang relatif rendah
  - i) Standar operasional pengolahan ikan yang rendah

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu pada 5 (Lima) Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a) Dukungan Kebijakan dan Dana dari APBD/ APBN
- b) Dukungan dari DPR RI/DPRD untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana kalautan dan perikanan
- c) Dukungan dan kerjasama dari Instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas
- d) Kesempatan SDM Kelautan dan Perikanan untuk mengikuti pelatihan peningkatan sumberdaya.
- e) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu

dalam Program Unggulan JARAPASAKA (Jagung, Porang, Padi, Sapi, Ikan)

- f) Meningkatnya kegiatan usaha masyarakat baik kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya perikanan maupun kegiatan pengolah dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Kelautan dan Perikanan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi urusan pilihan yang penting bagi negara dan daerah mengingat negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki luas lautan 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, sedangkan di Kabupaten Dompu luas perairannya adalah 1.298,17 km<sup>2</sup>. Sektor Kelautan dan Perikanan juga menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah terutama untuk mendukung pariwisata, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Adapun beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan, baik masalah internal maupun masalah eksternal, yaitu:

**Tabel 9.** Masalah Internal dan Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Masalah Internal</b>			
1.	Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang Kelautan dan Perikanan	Keterbatasan tingkat profesional/kualitas SDM Kelautan dan Perikanan yang relatif kurang	Masih adanya pegawai yang menempati tugas yang tidak sesuai dengan kompetensinya serta masih kurangnya pelatihan dan/diklat teknis

2.	Belum sempurnanya basis data dan informasi Kelautan dan Perikanan	Data serta informasi tentang kelautan dan perikanan masih terbatas dan belum tertata dengan baik dalam satu system jaringan	Pengelolaan data dan informasi pembangunan belum berbasis teknologi informasi
<b>Masalah Eksternal</b>			
1.	Tata ruang wilayah peruntukan sektor Kelautan dan Perikanan belum terwujud dengan baik	Tata ruang peruntukan sector kelautan dan perikanan sebagai bagaian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya Kelautan dan perikanan sampai saat ini belum optimal	Tata ruang yang belum mengakomodir lahan usaha budidaya dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus yang mendapat perlindungan dari konservasi dan bahaya pencemaran
2.	Masih terbatasnya jangkauan penangkapan ikan	Masih terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan	Nelayan belum memiliki Kapal yang representatif dan sarana dan prasarana yang memadai untuk penangkapan ikan
3.	Terbatasnya permodalan	Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan belum mampu bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya.	Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan
4.	Daya saing produk hasil Kelautan dan Perikanan	Harga jual produk kelautan dan perikanan relative kurang menguntungkan	Pemasaran hasil produk KP di pasar dalam negeri maupun ekspor sebagian besar masih ditentukan oleh konsumen/pembeli
4.	Fluktuasi harga sarana produksi Kelautan dan Perikanan	Pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah produk KP sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan	Kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi berakibat meningkatnya biaya produksi
5.	Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu	Menurunnya produksi perikanan tangkap dikarenakan terganggunya pola penangkapan ikan di masyarakat	Pemasaran global mengakibatkan iklim dan cuaca saat ini sulit terdeteksi
6	Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Masih rendahnya tingkat pemanfaatan luas lahan potensi yang ada	Rehabilitasi tambak yang belum optimal
7	Belum Adanya Kawasan Pengelolaan Perikanan Terpadu	Belum adanya prasarana pendukung kawasan pengelolaan perikanan terpadu	Belum masuknya usulan kegiatan pembangunan prasarana kawasan pengelolaan perikanan terpadu di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pusat

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu 2021-2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Dompu yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri, Sejahtera,  
Unggul dan Religius (MASHUR)”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026, akan dilaksanakan melalui upaya-upaya dengan 5 (Lima) misi Kabupaten Dompu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih);
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan potensi lokal yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap serta berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkarakter berbasis kearifan lokal;

Secara umum tugas Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-1 dan 2 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 yaitu :

**Misi ke-1 “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik  
dan Bersih”**

**Misi ke-2 "Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal berkelanjutan"**

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di sektor Kelautan dan Perikanan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Dompu yang dikaitkan dengan visi dan misi ke-1 dan 2 pembangunan jangka menengah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 tersebut adalah:

**Tujuan :**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Nilai PDRB sektor Kelautan dan Perikanan

**Sasaran :**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan

**Tabel 10.** Telaahan Visi dan Misi dengan Keterkaitan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Dompu

Misi Kepala Daerah	Implementasi di Dinas Kelautan dan Perikanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius (MASHUR)			
Misi-1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih	Predikat SAKIP SKPD	- Belum adanya pelatihan khusus tata cara penyusunan dokumen SAKIP	- Nilai SAKIP hasil Penilaian Inpektorat Kabupaten Tahun 2020 Berpredikat BB
Misi-2: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan	- Terbatasnya sumberdaya di bidang KP - Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Penggunaan Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan - Serangan penyakit	- Panjang garis pantai 272,6 Km - Potensi Luas Lahan Budidaya 9.043 Ha - Potensi Produksi olahan Kp sebesar 25.197,11 Ton - Nelayan sebanyak 7.218

		pada usaha budidaya - Terbatasnya Saprasi perikanan tangkap dan budidaya - Sarana rantai dingin yang belum memadai	Orang - Pembudidaya 4.489 orang - Pengolah dan pemasar 1.178 orang
--	--	--	--

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

#### **Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 bahwa **Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024** adalah *"Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*.

Sinergitas pembangunan nasional khususnya di sektor Kelautan dan Perikanan sejalan dengan pembangunan di daerah. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Dompu tahun 2021 - 2026 dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan khususnya dalam rangka peningkatan produksi hasil perikanan.

#### **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB**

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2019-2023, tentunya akan menjadi semakin selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah :

***"Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang"***

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB maka dapat disimpulkan adanya

keselarasan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu 2021 – 2026.

**Tabel 11.** Telaahan RENSTRA KL dengan Keterkaitan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Dompu

Sasaran KL	Sasaran NTB	Implementasi di Dinas Kelautan dan Perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	NTB Sejahtera dan Mandiri Melalui Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud</li> <li>- Terbatasnya permodalan</li> <li>- Daya Saing produk hasil KP</li> <li>- Fluktuasi harga sarana dan prasarana produksi KP</li> <li>- Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatn sumberdaya KP</li> <li>- Belum Adanya kawasan Perikanan Terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Tata ruang laut sedang dalam proses penyelesaian RZT teluk saleh sebagai wilayah budidaya, dan teluk sanggar wilayah penangkapan serta SAT Teluk Cempi telah selesai</li> <li>- Akses permodalan mulai tersedia oleh Lembaga Keuangan KKP dan Bank lainnya</li> <li>- Sosialisasi prediksi musim</li> <li>- Adanya pelatihan, seminar, dan bimtek lainnya</li> <li>- Di tahun 2021 telah disusun perencanaan Master Plan dan diteruskan dengan DED serta FS di tahun 2022</li> </ul>

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu akan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pengembangan sektor KP. Keseimbangan pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan dengan sektor lain akan terus dijaga, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar sektor, Isu-isu strategis tersebut memerlukan

penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Dompu yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, sebagai berikut :

**Tabel 12.** Telaahan RT/RW dan Implementasi di Dinas Kelautan dan Perikanan

RT/RW	Implementasi di Dinas Kelautan dan Perikanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Wilayah Rencana Tata Ruang kabupaten Dompu mencakup Perencanaan Seluruh Wilayah Administrasi Kabupaten Dompu meliputi Daratan Seluas Kurang Lebih 2.324,60 KM <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjabarkan program yang tertuang dalam RT/RW Kabupaten Dompu (Indikasi program utama, indikasi lokasi, sumber pendanaan, pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan</li> <li>- Implikasi Program utama pemanfaatan ruang (perwujudan rencana tata ruang pembangunan dan perwujudan kawasan strategis pembangunan)</li> <li>- Implikasi terhadap indikasi sumber pendanaan. Merencanakan alokasi anggaran pemanfaatan ruang melalui sumber dana dari pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan RT/RW belum selesai secara keseluruhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan RT/RW sedang berproses</li> </ul>

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi sektor Kelautan dan Perikanan baik secara kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keragamannya baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pembangunan Kelautan dan Perikanan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaannya menjadi lebih tepat sasaran.

Posisi geostrategis Kabupaten Dompu dalam konstelasi regional dan nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia menjadikan pembangunan Kelautan dan Perikanan memiliki tantangan yang sangat kompleks. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan dihadapi Kabupaten Dompu, tidak dapat dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu strategis yang dihadapi antara lain : “Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Serta Penguatan Sentra Komoditas Unggulan”

Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Dompu antara lain :

**Tabel 13.** Isu Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	ISU STRATEGIS
1	Terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam (hutan, pesisir, tanah, air dan udara) akibat pencemaran lingkungan pengelolaan sumberdaya tidak ramah lingkungan
2	Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor atau kekeringan sebagai dampak alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan
3	Menurunnya ketersediaan sumberdaya air baku untuk melindungi kebutuhan air bersih penduduk

4	Menurunnya keanekaragaman hayati dan flasma nutfah
5	Berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi kawasan terbangun

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

Tujuan dalam Rencana Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

**Tabel 14.** Tujuan yang ditetapkan untuk Mencapai Misi Kepala Daerah

NO	MISI KEPALA DAERAH	SASARAN STRATEGIS KEPALA DAERAH	TUJUAN SKPD
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Berkelanjutan	Intensifikasi Lahan kering dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dalam Rangka mendukung Pengembangan Komuditas JARAPASAKA	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Keluaran (*Outcome*) Program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

**Tabel 15.** Sasaran yang Ditempuh Untuk Mencapai Tujuan

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Secara rinci Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu disajikan pada Tabel 16 berikut ini.

**Tabel 16.** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran					
					Tahun Awal 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatnya Nilai PDRB sektor Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	45.893,60	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
			Produksi Perikanan Budidaya	Ton	9.220	9.925	10.575	11.215	11.860	12.505
			Volume Produksi Olahan Perikanan	Ton	22.906,47	23.200	23.400	23.600	23.800	24.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Nilai SAKIP A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Point	71,25	73,38	80,72	84,76	89,84	92,54

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Adapun perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pemerataan laju pengaturan nelayan dan kapal penangkapan ikan diperairan yang telah kelebihan batas tangkap
2. Modernisasi kapal tangkap
3. Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana PPI dan TPI
4. Restrukturisasi armada penangkapan ikan
5. Pemberian alat bantu penangkapan ikan dan pemulihan stok
6. habitat SDI ikan dengan penyediaan rumah ikan buatan, transplantasi karang dan penanaman mangrove
7. Pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, peningkatan perlindungan nelayan dan keselamatan kerja nelayan, pengembangan kemitraan usaha, pengembangan Keterampilan dan Iptek Nelayan
8. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pelaku usaha perikanan tangkap untuk memanfaatkan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan
9. Menyiapkan infrastruktur untuk menunjang pengembangan wisata mangrove, pemberdayaan masyarakat dan pembentukan kelompok-kelompok usaha dalam pengolahan mangrove dengan dukungan Pemerintah Daerah secara terus menerus

10. Melakukan Pembinaan intensif terhadap pelaku budidaya, memberikan stimulan SARPRAS budidaya seperti bibit ikan dan pakan
11. Identifikasi lahan tambak yang potensial, penerapan teknologi tambak tradisional menjadi semi intensif, Penyediaan exavator
12. Mengidentifikasi sarana dan prasarana pembudidaya yang dibutuhkan
13. Pembinaan SDM Pengolah dan Pemasar
14. Pemberian Bantuan Saprass Pengolah dan Pemasa
15. Identifikasi dan Validasi RTP Pengolah dan Pemasar
16. Melakukan Pembinaan intensif terhadap Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
17. Melakukan advokasi dan kerjasama semua lintas sektoral dalam memprovokasi konsumsi ikan di masyarakat
18. Menyusun perencanaan berupa DED dan FS serta menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana pendukung Fish Estate di Desa Mbawi.

## **5.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan Strategi adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana penangkapan ikan
  - a. Penambahan armada penangkapan
  - b. Peremajaan alat tangkap
  - c. Penumbuhan Kelompok, KUB menjadi koperasi, Penciptaan model-model kemitraan usaha dan fasilitasnya. Pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, Penataan sentra/kampung nelayan, Peningkatan kapasitas nakhoda dan juru mesin
  - d. Standardisasi kapal dan alat tangkap serta kerekayasaan dan penerapan inovasi teknologi kapal dan alat penangkap ikan yang efisien dan ramah lingkungan

- e. Bantuan kapal dan alat tangkap serta penguatan armada perikanan tangkap
- f. Mempertahankan keberadaannya mangrove dengan cara pengelolaan berkelanjutan, pemulihan dan rehabilitasi mangrove
- g. Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya
- h. Pendampingan penyuluh yang intensif dan pembinaan yang berkesinambungan
- i. Mengusulkan penambahan exavator
- j. Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya
- k. Mengadakan BIMTEK Pengolah dan Pemasar
- l. Memfasilitasi bantuan Saprasi yang bersumber dari dana APBN dan APBD
- m. Pendataan kembali dan validasi jumlah RTP Pengolah dan Pemasar
- n. Demonstrasi dan kampanye GEMARIKAN
- o. Mengusulkan perencanaan berupa DED dan FS beserta menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana pendukung Fish Estate Desa Mbawi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah berbasis potensi lokal mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi. Merujuk pada kedua strategi dan arah kebijakan pemerintahan atasannya tersebut maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 dapat dicermati sebagai berikut :

Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini

**Tabel 17.** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI KE-1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP SKPD	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD	a. Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran b. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu c. Penyediaan laporan kinerja yang akuntabel
MISI KE-2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal yang Berkelanjutan				
STRATEGI	Intensifikasi lahan kering dan optimalisasi pemanfaatan kawasan pesisir serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perikanan dalam rangka mendukung pengembangan komoditas JARAPASAKA				
ARAH KEBIJAKAN	Penyediaan benih dan bibit pertanian unggulan melalui balai benih; penyediaan gudang atau lumbung pangan; pilot project berupa demplot porang; penyediaan cold storage; penyediaan RPH yang memadai; penguatan usaha Agribisnis yang berskala industri serta usaha Agroindustri yang berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun pasar ekspor; stabilisasi harga				
Meningkatnya nilai PDRB sektor Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya peningkatan nilai PDRB sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Pemerataan laju pengaturan nelayan dan kapal penangkapan ikan, Modernisasi kapal tangkap, Pemberian alat bantu penangkapan ikan, Pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, peningkatan perlindungan nelayan dan keselamatan kerja nelayan, pengembangan kemitraan usaha, pengembangan Keterampilan dan Iptek Nelayan	Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana penangkapan ikan, Peremajaan alat tangkap, penambahan armada tangkap, Penumbuhan Kelompok, KUB menjadi koperasi, Standardisasi kapal dan alat tangkap serta kerekayasaan dan penerapan inovasi teknologi kapal dan alat penangkap ikan yang efisien dan ramah lingkungan, bantuan kapal dan alat tangkap

					serta penguatan armada perikanan tangkap, serta pemulihan dan rehabilitasi mangrove
			Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Menyiapkan infrastruktur untuk menunjang pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan pembentukan kelompok-kelompok usaha dengan dukungan PEMDA secara terus menerus	Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya, pendampingan penyuluh dan pembinaan yang berkesinambungan, mengusulkan penambahan excavator untuk mendukung Rehabilitasi dan Perluasan area tambak masyarakat, pendampingan penyuluh yang intensif, memberikan bantuan sarana serta prasarana budidaya dan memfasilitasi kegiatan investasi dan perikanan budidaya
			Persentase Produksi produk Olahan KP	Pembinaan SDM Pengolah dan Pemasar, pemberian Bantuan Saprasi Pengolah dan Pemasar, Melakukan Pembinaan intensif terhadap Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan, Melakukan advokasi dan kerjasama semua lintas sektoral dalam memprovoasi konsumsi ikan di masyarakat	Mengadakan <b>BIMTEK</b> Pengolah dan Pemasar, memfasilitasi bantuan Saprasi dari APBN dan APBD, pendataan kembali dan validasi jumlah RTP Pengolah Pemasar dan Demonstrasi dan kampanye <b>GEMARIKAN</b>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten Dompu 2021 - 2026, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tahun 2021 – 2026 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan dalam program urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 program rutin dengan 6 kegiatan, dan 3 program prioritas dengan 6 kegiatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Kabupaten Kepulauan dan Perikanan Kabupaten Dompu, program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ❖ Program Pengembangan Perikanan Budidaya
  - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
  - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- ❖ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
  - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Table 18.** Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan														Pengampu (Bidang /Subid)
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Akhir		
					K	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		3	Non Urusan																
		03:25	Non Bidang Urusan					7.797.37 0.808		7.936.15 2.936		8.183.51 1.946		8.336.67 6.682		8.401.75 1.078		44.455. 787.435	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP OPD	71,25	Point	73,38	3.415.868.808	80,72	3.471.019.951	84,76	3.547.773.946	89,94	3.612.223.682	92,54	3.676.751.078	94,54	17.723.637.465	
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP OPD	B-	Point	B-	80.000.000	BB	80.000.000	BB-	80.000.000	A-	80.000.000	A-	80.000.000	A-	400.000.000	Sekretariat
		01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1	Dokumen	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	400.000.000	
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pengadministrasian keuangan OPD	100	Persen	100	3.040.868.868	100	3.056.019.951	100	3.102.773.946	100	3.127.223.682	100	3.141.751.078	100	15.468.637.525	Sekretariat

01.2. 02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya ePembayaran Gaji ASN	12	Bu;an	12	2.680.868.868	12	2.686.019.951	12	2.722.773.946	12	2.732.223.682	12	2.741.751.078	60	13.563.637.525	
01.2. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pterlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Pengujian OPD	12	Bulan	12	290.000.000	12	290.000.000	12	290.000.000	12	295.000.000	12	300.000.000	60	1.465.000.000	
01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	13	Dokumen	13	70.000.000	13	80.000.000	13	90.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	65	440.000.000	
01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pengadministrasian umum OPD	100	Persen	100	165.000.000	100	210.000.000	100	225.000.000	100	255.000.000	100	265.000.000	100	1.120.000.000	Sekretariat
01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	20	Jenis	20	15.000.000	20	20.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	30.000.000	100	115.000.000	
01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	Unit	10	30.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	50	185.000.000	
01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Tersediannya Bahan Logistik Kantor (OPD)	10	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000		25.000.000		30.000.000	36		
01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30	Jenis	30	30.000.000	30	40.000.000	30	30.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	150	180.000.000	
01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersediannya Bahan Bacaan OPD		Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		5.000.000		5.000.000	36		

		Undangan															
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu OPD	12	Bulan	12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	120.000.000	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi OPD	50	Kegiatan	50	50.000.000	50	70.000.000	53	75.000.000	56	90.000.000	70	90.000.000	279	375.000.000	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD dalam Menunjang Urusan Pemerintah	100	Persen	100	35.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	255.000.000	
01.2.07.05	Pengadaan mebel	Tersedianya Mebel untuk menunjang OPD	10	Unit	10	15.000.000	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	50	105.000.000	
01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Unit	5	20.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	40.000.000	25	150.000.000	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan OPD	100	Persen	100	221.000.000	100	240.000.000	100	250.000.000	100	260.000.000	100	270.000.000	100	1.241.000.000	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersediannya Kerjasama dengan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	12	Bulan	12	30.000.000	12	32.000.000	12	34.000.000	12	36.000.000	12	38.000.000	60	170.000.000	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum kantor	12	Bulan	12	191.000.000	12	208.000.000	12	216.000.000	12	224.000.000	12	232.000.000	60	1.071.000.000	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase BMD dalam kondisi baik	100	Persen	100	129.999.940	100	125.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	190.000.000	100	734.999.940	Sekretariat

			Urusan Pemerintahan Daerah																
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Peroarangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan kendaraan Operasional	1	Tahun	1	70.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	5	385.000.000	
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	1	Tahun	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	5	100.000.000	
		01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung bangunan Kantor	1	Tahun	1	49.999.940	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	70.000.000	5	249.999.940	
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap terhadap target daerah	Na	Persen	19,17	1.800.000.000	19,58	1.800.000.000	20,00	1.800.000.000	20,42	1.850.000.000	20,83	1.850.000.000	100	9.100.000.000	Bidang Perikanan Tangkap
		03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam satu daerah Kabupaten yang tersedia	45850	Ton	46.000	1.600.000.000	47.000	1.600.000.000	48.000	1.600.000.000	49.000	1.650.000.000	50.000	1.650.000.000	240000		Subid Supras Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan

03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia	500	Unit	550	1.600.000.000	600	1.600.000.000	650	1.600.000.000	700	1.650.000.000	750	1.650.000.000	3250	8.100.000.000	
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir	13,83	Persen	15,73	200.000.000	17,54	200.000.000	19,34	200.000.000	21,11	200.000.000	22,87	200.000.000	96,59		Subid Pemberdayaan Masyarakat pesisir, Pengembangan Usaha dan Kelembagaan
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	80	Orang	80,00	200.000.000	80,00	200.000.000	80,00	200.000.000	80,00	200.000.000	80,00	200.000.000	400,00	1.000.000.000	
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan budidaya terhadap target daerah	Na	Persen	13,69	1.700.000.000	15,28	1.700.000.000	17,26	1.700.000.000	18,25	1.700.000.000	19,25	1.700.000.000	83,72	8.500.000.000	Bidang Perikanan Budidaya
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan	23,46	Persen	27,04	200.000.000	32,12	200.000.000	38,98	200.000.000	47,89	200.000.000	59,10	200.000.000	59,1	1.000.000.000	Subid Budidaya dan Usaha Perikanan
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	120		167	200.000.000	237	200.000.000	319	200.000.000	417	200.000.000	527	200.000.000	1.667	1.000.000.000	

04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	8.895,00	Ton	9.925,00	1.300.000.000,00	10.575,00	1.300.000.000,00	11.215,00	1.300.000.000,00	11.860,00	1.300.000.000,00	12.505,00	1.300.000.000,00	64.975	6.500.000.000	
	<i>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten</i>	<i>Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten</i>	150	Unit	212	1.000.000.000	277	1.000.000.000	347	1.000.000.000	180	1.000.000.000	195	1.000.000.000	1.211	5.000.000.000	
	<i>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Daerah Kabupaten</i>	<i>Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 daerah kabupaten yang teruji melalui pengelolaan lingkungan</i>	4.274	(000) Ekor	4.786	300.000.000	5.360	300.000.000	5.891	300.000.000	6.597	300.000.000	6.926	300.000.000	29.560	1.500.000.000	
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan volume produksi olahan perikanan	Na	Persen	4	881.502.000	4,5	965.132.985	5	1.135.738.000	5,5	1.174.453.000	28	1.175.000.000	46,6	9.132.149.970	Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan usaha mikro dan kecil bidang perikanan yang tersertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan	22,73	Persen	33,33	150.000.000	45,45	165.132.985	63,64	200.000.000	81,82	200.000.000	100	200.000.000	324,24	915.132.985	Subid Bina Mutu dan Diverifikasi Produk KP

		06.2. 02.01	Pelaksanaan bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	5	Kegiatan	10,00	150.000.000	10,00	165.132.985	15,00	1.135.738.000	15,00	1.174.453.000	15	1.175.000.000	65	3.800.323.985	
		06.2. 03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan	100	Persen	100	731.502.000	100	800.000.000	100	935.738.000	100	974.453.000	100	975.000.000	100	4.416.693.000	Subid Pengembangan Investasi dan Sistem Logistik
		06.2. 03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 daerah Kabupaten	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kabupaten	1250	Ton	1.350	690.392.000	1.400	368.497.074	1.450	435.738.000	1.500	338.714.696		300.000.000	5.700	2.133.341.770	
		06.2. 03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kabupaten yang	80	UKM	120	41.110.000	160	431.502.926	160	500.000.000	160	635.738.304		675.000.000	600	2.283.351.230	

		Daerah Kabupaten	terfasilitasi												
TOTAL ANGGARAN				7.797.37 0.808		7.936.15 2.936		8.183.51 1.946		8.336.67 6.682		8.401.75 1.078			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu adalah ketersediaan Indikator Kinerja yang berguna untuk mengukur Capaian Target Kinerja Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam Evaluasi Kinerja Program- Program Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Dokumen Perencanaan.

Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Target Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini akan diukur dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam Pelaporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu selama 5 (Lima) Tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 19 berikut :

**Tabel 19.** Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2026

No	Indikator	Satuan	Formula	Capaian	Target Tahunan						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	OPD Pengampu
				Angka	Angka	Angka	Angka	Angka	Angka		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan										
1	Produksi Perikanan Tangkap	(Ton)(%)	Hasil Tangkapan dalam kurun waktu 1 tahun oleh Nelayan	45.893,60	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000	50.000	Dislutkan
	Produksi Perikanan Budidaya	(Ton)(%)	Hasil Produksi Perikanan Budidaya dalam Kurun waktu 1 tahun	9.219,47	9.925	10.575	11.215	11.860	12.505	12.505	Dislutkan
	Volume Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	(Ton)(%)	Hasil produk olahan oleh UKM Pengolah dan Pemasar KP dalam kurun waktu 1 tahun	22.906,47	23.200	23.400	23.600	23.800	24.000	24.000	Dislutkan
2	Nilai SAKIP OPD	Point	Nilai SAKIP OPD	71,25	73,38	80,72	84,76	89,84	92,54	92,54	Dislutkan

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu Tahun 2021-2026 adalah selama 5 (Lima) Tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan pada Masa Transisi, maka Renstra Tahun 2016-2021 dapat digunakan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Dompu Tahun 2005-2025.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut ;

1. Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu agar mendukung Pencapaian Target-Target Renstra serta melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya
2. Diharapkan Seluruh Aparatur di Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai
3. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu yang merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun. Untuk menjaga konsisten dan keselarasan

Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Penyusunan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu wajib berpedoman pada RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu

4. Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta memastikan pencapaian target-target RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Program dan Kegiatan RENSTRA secara berkala
5. Apabila terjadi Perubahan Kebijakan Pembangunan di Tingkat Nasional dan/atau Daerah, maka dapat dilakukan Perubahan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu sesuai dengan Kaidah dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dompu, Januari 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Dompu,

**Amiruddin, S.Hut**

Pembina/ (IV/a)

NIP. 19711130 199803 1 009